

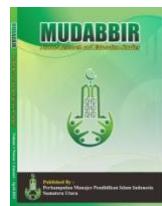


JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

Peran Komunikasi dalam Memahami Konflik Politik

Ahmad Sampurna Rambe¹, Ainun Mardiah²,
Filza Frilatia Bahri³, Muhammad Ibnu Thariq⁴, Rifqi Qardhawi Arsyad⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: ahmadsampurnauinsu@gmail.com¹, ainunmardiah2003nun@gmail.com²,
filzafrilatia22@gmail.com³, ibnuthariq240903@gmail.com⁴, rifqi170703@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran komunikasi dalam memahami konflik politik, dengan fokus pada bagaimana komunikasi dapat membentuk, memperburuk, atau meredakan ketegangan politik. Konflik politik sering kali dipicu oleh miskomunikasi, penyebaran informasi yang salah, dan polarisasi yang semakin tajam di media sosial. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan wawancara, observasi media sosial, dan studi literatur untuk menggali dinamika komunikasi dalam konflik politik. Temuan menunjukkan bahwa media sosial, meskipun mempercepat penyebaran informasi, sering kali memperburuk konflik melalui hoaks, ujaran kebencian, dan fenomena ruang gema (*echo chamber*). Namun, komunikasi yang konstruktif juga dapat menciptakan ruang untuk dialog, rekonsiliasi, dan pemahaman bersama.

Kata Kunci: Komunikasi, Konflik Politik, Ruang Gema.

ABSTRACT

This study examines the role of communication in understanding political conflict, focusing on how communication can shape, exacerbate, or ease political tensions. Political conflict is often triggered by miscommunication, the spread of misinformation, and increasing polarization on social media. Through a qualitative approach, this study uses interviews, social media observations, and literature studies to explore the dynamics of communication in political conflict. The findings show that social media, although accelerating the spread of information, often exacerbates conflict through hoaxes, hate speech, and the echo chamber phenomenon. However, constructive communication can also create space for dialogue, reconciliation, and shared understanding.

Keywords: Communication, Political Conflict, Echo Chamber.

PENDAHULUAN

Konflik politik telah menjadi salah satu fenomena yang tak terpisahkan dari perjalanan sejarah umat manusia. Dari perebutan kekuasaan di tingkat lokal hingga persaingan ideologi di panggung internasional, konflik politik kerap kali menciptakan ketegangan, polarisasi, bahkan kekerasan. Namun, di balik semua dinamika yang terjadi, komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk, memperburuk, maupun meredakan konflik politik tersebut.

Komunikasi bukan hanya sebatas penyampaian pesan antar pihak yang bertikai, tetapi juga mencakup proses membangun makna, persepsi, dan pemahaman bersama mengenai isu-isu yang diperdebatkan. Dalam konteks ini, memahami bagaimana komunikasi bekerja dalam konflik politik bukan hanya penting bagi para aktor politik, tetapi juga bagi masyarakat luas yang terdampak oleh dinamika tersebut (Deddy Mulyana, 2015: 105).

Dalam berbagai kasus, konflik politik tidak selalu muncul semata-mata karena perbedaan kepentingan, tetapi seringkali dipicu oleh miskomunikasi, prasangka, atau penyebaran informasi yang salah. Media massa, media sosial, pidato politik, hingga diskusi publik menjadi arena utama di mana komunikasi memainkan peran krusial dalam membentuk opini dan persepsi masyarakat. Ketika komunikasi berjalan secara konstruktif misalnya melalui dialog, negosiasi, atau mediasi potensi konflik bisa diminimalisasi (Siagian, 2018: 63).

Sebaliknya, ketika komunikasi sarat dengan provokasi, manipulasi, dan hoaks, konflik politik dapat semakin meruncing dan sulit diselesaikan. Oleh karena itu, mempelajari peran komunikasi dalam konteks ini membantu kita memahami tidak hanya akar persoalan politik, tetapi juga strategi untuk mengelola perbedaan secara damai.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi turut memberikan warna baru dalam dinamika konflik politik. Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram menjadi wadah yang mempercepat penyebaran informasi politik, baik yang bersifat membangun maupun yang destruktif. Di satu sisi, media sosial memungkinkan masyarakat lebih terlibat dalam percakapan politik; namun di sisi lain, platform ini juga memfasilitasi polarisasi dan menciptakan “ruang gema” (*echo chamber*) yang

memperkuat keyakinan kelompok tertentu tanpa membuka ruang dialog dengan pihak lain. Hal ini membuat peran komunikasi menjadi semakin kompleks, karena tidak lagi hanya bergantung pada isi pesan, tetapi juga pada saluran dan pola interaksi yang terbentuk (Suryanto, 2017: 98).

Dengan memahami peran komunikasi dalam konflik politik, kita tidak hanya belajar bagaimana konflik itu muncul dan berkembang, tetapi juga menemukan peluang-peluang untuk menciptakan resolusi yang lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai bagaimana komunikasi bekerja dalam berbagai lapisan konflik politik, mulai dari wacana di media hingga interaksi antarindividu dan kelompok. Selain itu, kajian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mengoptimalkan komunikasi sebagai sarana rekonsiliasi dan membangun pemahaman bersama, bukan sekadar alat untuk memenangkan pertarungan politik semata (Nurudin, 2019: 57).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam peran komunikasi dalam konteks konflik politik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada upaya menggali makna, perspektif, serta dinamika komunikasi yang terjadi antara aktor politik dan masyarakat dalam situasi konflik.

Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan yang terletak di antara interpretasi yang kompleks atas kenyataan sosial dan usaha untuk menjelaskan makna yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menegaskan bahwa penelitian kualitatif berusaha memahami objek penelitian dalam konteksnya secara alamiah, tanpa intervensi atau manipulasi dari peneliti.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait peran komunikasi dalam memahami konflik politik. Teknik pertama adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber terkait (Assingkily, 2021). Selanjutnya, peneliti melakukan pengamatan atau observasi online terhadap interaksi di ruang publik seperti debat politik, siaran berita, kampanye media sosial, dan diskusi komunitas. Terakhir, studi literatur digunakan untuk mengumpulkan berita media massa, pernyataan resmi

partai, unggahan media sosial, dan laporan lembaga pemantau konflik, sehingga memberikan gambaran utuh mengenai narasi dan dinamika yang berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap media sosial, penelitian ini menemukan bahwa komunikasi di platform digital seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk persepsi publik terhadap konflik politik. Pengamatan menunjukkan bahwa media sosial sering kali menjadi arena pertarungan opini yang panas, di mana para pendukung kubu politik saling melontarkan komentar, kritik, bahkan serangan verbal.

Di satu sisi, media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam percakapan politik, menyuarakan pendapat, dan mengakses informasi secara cepat. Namun di sisi lain, media sosial juga memperlihatkan sisi gelap komunikasi politik, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi tajam di antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan. Selama periode pengamatan, terlihat bagaimana momen-momen politik tertentu, seperti kampanye pemilu, pengumuman hasil pemilu, atau isu-isu kebijakan kontroversial, memicu lonjakan interaksi di media sosial, yang tidak jarang berujung pada perdebatan sengit di ruang publik digital.

Selain itu, studi pustaka yang dilakukan untuk mendukung penelitian ini memperkuat temuan dari observasi media sosial. Dari berbagai literatur yang ditelaah, ditemukan bahwa komunikasi memiliki fungsi strategis dalam memengaruhi opini publik, membentuk identitas politik, dan bahkan memobilisasi massa. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa komunikasi politik bukan hanya soal isi pesan, tetapi juga tentang bagaimana pesan itu dikemas dan disebarluaskan melalui berbagai saluran, termasuk media konvensional maupun media digital. Salah satu literatur menekankan bahwa *framing* media bagaimana suatu isu dipresentasikan berperan besar dalam menentukan cara publik memahami konflik politik.

Selain itu, teori *echo chamber* yang banyak dibahas dalam literatur mutakhir menggambarkan bagaimana media sosial cenderung menciptakan ruang gema, di mana individu hanya terpapar pada informasi yang memperkuat pandangan mereka sendiri, sehingga mempersempit ruang dialog dan kompromi.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa komunikasi di media sosial kerap kali berlangsung tanpa filter, membuat emosi pengguna lebih mudah meledak dan memperbesar eskalasi konflik. Misalnya, komentar-komentar di bawah unggahan berita politik sering kali dipenuhi dengan caci maki dan ujaran kebencian, yang tidak hanya ditujukan kepada tokoh politik, tetapi juga antarpendukung.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa media sosial tidak hanya menjadi saluran penyebaran informasi, tetapi juga menjadi medium ekspresi identitas politik dan solidaritas kelompok. Hal ini sejalan dengan temuan studi pustaka yang menyebutkan bahwa media digital telah mengubah lanskap komunikasi politik, di mana batas antara aktor politik dan publik semakin kabur, dan masyarakat memiliki peran lebih besar dalam membentuk wacana politik.

Selain itu, pengamatan peneliti terhadap pola interaksi di media sosial juga mengungkap adanya upaya-upaya konstruktif yang muncul di tengah derasnya arus konflik. Beberapa akun media, komunitas, maupun individu mencoba menginisiasi dialog, menyebarkan konten edukatif, atau mengampanyekan pesan-pesan damai untuk meredakan ketegangan politik. Meski skalanya belum terlalu besar, upaya-upaya ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai pemicu konflik, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekonsiliasi dan pembangunan pemahaman bersama. Studi pustaka yang mendukung temuan ini juga menekankan pentingnya literasi media dan komunikasi sebagai salah satu kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tahan terhadap provokasi dan manipulasi informasi dalam konteks konflik politik.

Pembahasan

Komunikasi sebagai Faktor Pembentuk Persepsi dalam Konflik Politik

Komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi publik terhadap konflik politik, terutama dalam konteks media sosial yang kini menjadi arena utama diskusi politik. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan pesatnya penggunaan platform digital seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, masyarakat kini memiliki akses yang lebih besar untuk terlibat dalam percakapan politik. Media sosial tidak hanya mempercepat aliran informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk berbagi opini, berdiskusi, dan mengkritisi berbagai peristiwa politik yang terjadi di tingkat

lokal, nasional, hingga internasional. Dalam konteks ini, komunikasi di media sosial berfungsi sebagai alat untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu politik yang sedang berkembang (Sumarni, 2016: 101).

Namun, komunikasi yang terjadi di media sosial tidak selalu berjalan dengan cara yang konstruktif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa seringkali komunikasi di platform digital justru memperburuk situasi konflik politik yang ada. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan hoaks, yang secara sengaja disebarluaskan untuk memprovokasi atau memanipulasi opini publik.

Hoaks yang beredar di media sosial sering kali memperkuat polarisasi di antara kelompok-kelompok politik yang berbeda, menyebabkan ketegangan yang semakin meningkat. Selain itu, ujaran kebencian dan serangan verbal yang muncul dalam debat politik digital sering kali menambah eskalasi konflik, memperburuk hubungan antar individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik tersebut.

Penting untuk dipahami bahwa media sosial, dalam banyak kasus, berfungsi sebagai ruang yang memperkuat pandangan atau posisi politik tertentu. Fenomena ini, yang sering disebut dengan istilah *echo chamber*, menggambarkan bagaimana individu atau kelompok hanya terpapar pada informasi yang menguatkan pandangan mereka, tanpa adanya ruang untuk mendengarkan pandangan dari pihak lain.

Hal ini menciptakan ketegangan yang lebih dalam, karena setiap kelompok semakin terisolasi dalam ruang wacana yang terbatas, dan jarang ada upaya untuk melakukan dialog atau mencapai konsensus. Dalam situasi seperti ini, komunikasi politik tidak hanya menjadi cara untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat polarisasi dan memperburuk hubungan antar kelompok.

Namun, meskipun banyak komunikasi yang terjadi di media sosial cenderung memperburuk ketegangan politik, peran komunikasi juga tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai faktor yang hanya merusak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dan konstruktif dapat berfungsi sebagai alat untuk meredakan ketegangan dan membentuk pemahaman yang lebih seimbang. Misalnya, dengan adanya upaya untuk menyebarluaskan informasi yang akurat, melakukan klarifikasi

terhadap hoaks, atau menginisiasi dialog yang terbuka dan inklusif, komunikasi dapat membantu mengurangi perbedaan pandangan dan membuka ruang bagi terciptanya rekonsiliasi politik. Dalam hal ini, peran komunikasi sangat krusial, karena meskipun media sosial dapat memperburuk konflik, platform tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik antara kelompok-kelompok yang terlibat (Fajar & Lestari, 2021: 24).

Di era digital ini, di mana informasi tersebar dengan sangat cepat dan luas, penting bagi setiap individu untuk memiliki literasi media yang baik agar dapat memilah informasi yang benar dan meminimalisir dampak negatif dari komunikasi yang tidak akurat atau penuh kebencian.

Dinamika Media Sosial dalam Menyebarluaskan Konflik Politik

Media sosial, dengan peranannya yang semakin dominan dalam komunikasi politik, telah menjadi saluran utama bagi masyarakat untuk mengakses informasi politik, berpartisipasi dalam diskusi, dan menyuarakan pendapat. Namun, meskipun media sosial menawarkan platform yang mempercepat aliran informasi, ia juga menghadirkan tantangan besar dalam hal bagaimana informasi tersebut dikonsumsi dan diproses oleh publik. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah bagaimana media sosial berfungsi sebagai arena utama untuk pertarungan opini politik (Putri & Mahendra, 2020: 31).

Setiap pengguna memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pandangannya, dan hal ini seringkali memunculkan perdebatan sengit antara berbagai kelompok politik yang memiliki pandangan berbeda. Dalam banyak kasus, diskusi politik yang terjadi di media sosial beralih dari dialog yang konstruktif menjadi serangan verbal, argumen yang tidak berlandaskan fakta, atau bahkan penyebaran fitnah dan hoaks yang semakin memperburuk situasi.

Salah satu fenomena yang paling menonjol dalam dinamika media sosial terkait konflik politik adalah polarisasi. Platform digital memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok yang terpolarisasi berdasarkan ideologi atau afiliasi politik

mereka. Fenomena ini dikenal dengan istilah *echo chamber*, di mana individu hanya terpapar pada informasi yang memperkuat pandangan mereka sendiri, sementara pandangan dari pihak lain diabaikan atau bahkan diserang. Hal ini menciptakan ruang di mana perbedaan pendapat menjadi semakin tajam dan meminimalisir kemungkinan tercapainya pemahaman atau kompromi antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan. Dalam konteks konflik politik, polarisasi ini memperburuk ketegangan yang sudah ada, menghambat dialog yang produktif, dan bahkan menciptakan ketakutan atau kebencian terhadap pihak yang dianggap sebagai "musuh politik".

Penyebaran informasi yang salah atau hoaks juga merupakan masalah besar dalam dinamika media sosial. Dalam banyak kasus, informasi yang tidak akurat atau sengaja diputarbalikkan disebarluaskan dengan cepat, terutama selama masa-masa krisis politik seperti kampanye pemilu atau pengumuman hasil pemilu. Media sosial menjadi saluran yang ideal bagi penyebaran informasi palsu karena karakteristiknya yang cepat dan luas dalam menjangkau audiens.

Selain itu, algoritma media sosial sering kali memperkuat paparan terhadap informasi yang sensasional atau kontroversial, yang membuat hoaks dan berita palsu lebih mudah viral. Ini semakin memperburuk ketegangan politik karena masyarakat tidak selalu dapat membedakan antara informasi yang valid dan yang tidak valid, sehingga menciptakan kesalahpahaman dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap institusi politik atau pemerintahan (Rismayana, 2019: 40).

Namun, meskipun media sosial sering kali memperburuk dinamika konflik politik, ada juga contoh di mana platform ini digunakan untuk tujuan yang lebih konstruktif. Misalnya, beberapa kelompok atau individu di media sosial mencoba menyebarkan pesan-pesan damai, melakukan klarifikasi terhadap informasi yang salah, atau menginisiasi dialog yang lebih terbuka antar kelompok yang berbeda. Meskipun upaya-upaya ini mungkin tidak selalu mendapatkan perhatian yang sama besar seperti perdebatan atau polemik yang sering muncul, mereka tetap menunjukkan bahwa media sosial juga dapat berfungsi sebagai alat untuk meredakan ketegangan dan memperbaiki hubungan antar kelompok politik yang terpecah.

Pengaruh Framing Media dalam Konflik Politik

Framing media merupakan salah satu mekanisme komunikasi yang sangat berpengaruh dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu-isu politik, termasuk konflik politik. Framing merujuk pada cara media menyajikan, mengorganisir, dan membungkai informasi untuk memberikan makna tertentu pada sebuah peristiwa atau isu. Cara media membungkai suatu isu tidak hanya memengaruhi bagaimana masyarakat memahami isu tersebut, tetapi juga dapat menentukan sikap dan respons publik terhadap isu tersebut (Kurniawati, 2021: 59).

Dalam konteks konflik politik, framing media berperan sangat penting dalam memengaruhi persepsi publik, karena media memiliki kemampuan untuk mengarahkan fokus perhatian pada aspek-aspek tertentu dari suatu konflik, sambil mengabaikan atau mereduksi aspek lainnya. Hal ini menciptakan narasi tertentu yang bisa mempengaruhi opini publik secara signifikan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa framing media dalam konflik politik sering kali diarahkan untuk mempengaruhi dukungan atau penolakan terhadap pihak-pihak tertentu dalam konflik tersebut. Misalnya, ketika media lebih banyak menyoroti kekerasan atau pelanggaran yang dilakukan oleh satu pihak, hal ini dapat membentuk persepsi negatif terhadap pihak tersebut, sementara mengabaikan atau mengecilkan kesalahan yang dilakukan oleh pihak lainnya.

Framing ini memperburuk polarisasi, karena audiens cenderung menerima pandangan yang disampaikan oleh media sesuai dengan framing yang diberikan, tanpa memeriksa atau mempertanyakan kebenaran informasi tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperburuk ketegangan antar kelompok politik, karena masing-masing pihak merasa bahwa mereka tidak dipahami atau dihargai oleh media.

Selain itu, penelitian ini juga menekankan bahwa framing media dapat berfungsi sebagai alat yang memperburuk konflik politik, terutama ketika media memanfaatkan elemen-elemen emosional dalam pemberitaannya. Misalnya, menggunakan bahasa yang provokatif, gambar yang menggugah emosi, atau memilih judul yang bombastis bisa memperburuk ketegangan yang sudah ada. Media yang mengedepankan narasi "kami vs mereka" atau "benar vs salah" dapat memperparah ketegangan politik, karena

framing tersebut mengajak audiens untuk memilih pihak yang benar atau salah tanpa memberikan ruang untuk memahami kompleksitas suatu masalah. Hal ini semakin mengunci posisi masing-masing pihak dalam konflik, memperbesar jurang perbedaan, dan mengurangi kemungkinan dialog atau kompromi.

Namun, meskipun framing media sering kali dapat memperburuk situasi, penelitian ini juga menemukan bahwa media memiliki potensi untuk meredakan konflik politik jika framing yang diterapkan lebih konstruktif dan inklusif. Sebagai contoh, media yang memilih untuk menekankan pesan damai, membungkai informasi dengan pendekatan yang lebih seimbang, atau memperlihatkan berbagai perspektif yang ada dapat membantu membangun pemahaman bersama dan membuka ruang untuk rekonsiliasi (Putri, 2020: 29).

Media yang memberikan ruang bagi dialog antara pihak yang terlibat dalam konflik dapat mengurangi ketegangan dan mendorong masyarakat untuk mencari solusi yang lebih damai dan produktif. Dalam hal ini, framing yang adil dan berimbang dapat berperan sebagai alat untuk meredakan ketegangan politik dan memperbaiki hubungan antar kelompok yang terpecah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis terhadap bagaimana isu-isu politik dibingkai oleh media, serta untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas dan objektif tentang peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung, agar dapat mengurangi dampak negatif dari framing yang dapat memperburuk polarisasi dan ketegangan politik.

Peran Media Sosial dalam Menciptakan Ruang Gema (Echo Chamber)

Fenomena *echo chamber* atau ruang gema di media sosial semakin menjadi perhatian dalam studi komunikasi politik, terutama dalam konteks konflik politik. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana media sosial memperkuat fenomena ini, di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan pandangan atau keyakinan mereka sendiri, tanpa adanya interaksi atau paparan terhadap perspektif lainnya. Media sosial, dengan algoritma yang dirancang untuk menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi individu, memperburuk fenomena *echo chamber* (Santoso, 2022: 38).

Ketika seseorang terpapar pada berita atau komentar yang hanya mendukung sudut pandangnya, hal ini menciptakan lingkaran informasi yang semakin sempit, di mana hanya pandangan tertentu yang semakin diperkuat. Fenomena ini, pada gilirannya, berkontribusi pada polarisasi yang lebih tajam, karena masing-masing kelompok merasa semakin terpisah dan tidak dapat menemukan kesamaan atau titik temu dengan pihak lain.

Fenomena *echo chamber* di media sosial memperburuk komunikasi dalam konflik politik, terutama karena informasi yang lebih ekstrem atau radikal sering kali mendapatkan perhatian yang lebih besar. Dalam ruang gema ini, individu atau kelompok yang memiliki pandangan politik tertentu cenderung memperkuat posisi mereka dan menghindari informasi yang dapat memicu keraguan atau menantang keyakinan mereka.

Akibatnya, sudut pandang yang lebih moderat atau kompromistik semakin terpinggirkan, sementara pandangan yang lebih keras dan absolut semakin mendominasi diskursus politik. Polarisasi ini semakin parah, karena kedua belah pihak cenderung hanya terlibat dalam percakapan dengan kelompok yang sepaham, menghindari dialog atau diskusi dengan pihak yang memiliki pandangan berbeda. Hal ini menjadikan komunikasi yang konstruktif dan produktif semakin sulit tercapai.

Selain itu, media sosial juga menyediakan platform bagi penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau hoaks, yang semakin memperburuk situasi dalam konflik politik. Informasi yang keliru atau sengaja dimanipulasi bisa dengan cepat tersebar di dalam ruang gema, memperkuat pandangan ekstrem dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Misalnya, rumor atau klaim yang tidak didukung oleh bukti yang valid dapat dengan mudah disebarluaskan dalam kelompok-kelompok yang sepaham, yang kemudian memperkuat keyakinan mereka tanpa mempertanyakan kebenarannya. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman yang semakin mendalam antara kelompok yang berbeda, memperburuk polarisasi dan mempersulit proses rekonsiliasi (Wijaya, 2022: 78).

Fenomena *echo chamber* ini juga memperkecil ruang untuk dialog yang produktif dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencapai solusi bersama. Ketika

setiap kelompok hanya terpapar informasi yang menguatkan pandangan mereka dan menghindari perspektif lain, kemungkinan untuk menemukan kesamaan atau jalan tengah dalam konflik politik menjadi sangat kecil. (Wulandari, 2021: 11) Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya memperburuk ketegangan politik, tetapi juga menghambat proses demokrasi yang sehat, di mana ruang untuk diskusi dan negosiasi antar kelompok dengan pandangan yang berbeda sangat penting. Oleh karena itu, penting bagi pengguna media sosial untuk lebih kritis dalam memilih informasi dan membuka diri terhadap perspektif lainnya, agar dapat mengurangi dampak negatif dari fenomena *echo chamber* ini.

Pentingnya Literasi Media dalam Mengelola Konflik Politik

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah pentingnya literasi media sebagai alat untuk mengelola komunikasi dalam konflik politik. Literasi media, yang meliputi kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dengan kritis, menjadi kunci dalam menghadapi gelombang informasi yang begitu deras di media sosial dan media massa.

Dengan literasi media yang baik, masyarakat tidak hanya dapat memilih mana informasi yang valid dan mana yang tidak, tetapi juga bisa lebih waspada terhadap manipulasi atau penyebaran informasi palsu yang sering digunakan untuk memperburuk situasi konflik politik. Misalnya, dalam menghadapi hoaks atau berita yang tidak terverifikasi, masyarakat yang memiliki kemampuan literasi media akan lebih mudah mendeteksi ketidaksesuaian atau kejanggalan dalam informasi tersebut, yang pada gilirannya dapat mengurangi dampak negatif dari penyebaran hoaks tersebut (Ardianto, 2021: 87).

Selain itu, peningkatan literasi media memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih konstruktif dalam percakapan politik. Ketika individu mampu menyaring informasi dengan baik, mereka lebih cenderung menghindari terjebak dalam retorika provokatif yang dapat memperburuk polarisasi. Selain itu, masyarakat yang terlatih dalam literasi media dapat lebih siap untuk melibatkan diri

dalam diskusi yang lebih terbuka dan produktif, di mana argumen dan perspektif yang berbeda dapat dibahas secara rasional (Ramdhani, 2020: 18).

Hal ini tidak hanya membantu mengurangi ketegangan yang ada, tetapi juga membuka ruang untuk dialog yang lebih inklusif, di mana setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka dengan cara yang lebih sopan dan berbasis fakta. Dengan demikian, literasi media memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan komunikasi politik yang lebih sehat dan dapat mengurangi potensi eskalasi dalam konflik politik.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dinamika dan resolusi konflik politik. Media sosial, sebagai saluran utama komunikasi politik, memiliki dampak ganda; di satu sisi, ia memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam percakapan politik, namun di sisi lain, ia juga memperburuk polarisasi, menyebarkan informasi yang salah, dan memperkuat perbedaan pandangan. *Framing* media dan fenomena ruang gema (*echo chamber*) menjadi faktor yang memperburuk komunikasi politik, karena mempersempit ruang untuk dialog dan kompromi antar kelompok yang berkonflik.

Pentingnya literasi media sebagai alat untuk mengelola komunikasi dalam konflik politik sangat ditekankan dalam penelitian ini. Dengan peningkatan literasi media, masyarakat dapat lebih kritis dalam mengakses dan menyaring informasi, sehingga mengurangi dampak dari hoaks dan informasi yang memanipulasi. Literasi media yang baik membuka peluang untuk dialog yang lebih produktif, mengurangi eskalasi konflik, dan menciptakan pemahaman yang lebih damai antar pihak yang berbeda. Dengan demikian, pemahaman yang lebih dalam tentang peran komunikasi dalam konflik politik dapat membantu menciptakan resolusi yang lebih efektif dan konstruktif.

REFERENSI

- Ardianto, A. (2021). "Peran Literasi Media dalam Mencegah Radikalasi pada Media Sosial." *Jurnal Komunikasi dan Literasi*. Vol. 7, No. 3.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Fajar, K. dan Lestari, A. (2021). "Peran Komunikasi dalam Membentuk Persepsi Politik Masyarakat." *Jurnal Komunikasi Indonesia*. Vol. 10, No. 2.
- Kurniawati, I. (2021). "Framing Media dalam Konflik Politik: Kasus Pemilu 2019." *Jurnal Sosial dan Politik*. Vol. 8, No. 1.
- Mulyana, D. (2015). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurudin, N. (2019). *Komunikasi Politik dalam Perspektif Media Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putri, A. dan Mahendra, T. (2020). "Dinamika Media Sosial dalam Konflik Politik di Indonesia." *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 15, No. 3.
- Putri, R. (2020). "Pengaruh Framing Media dalam Pembentukan Opini Publik di Konflik Politik." *Jurnal Sosiologi Politik*. Vol. 10, No. 1.
- Ramadhani, M. (2020). "Pengaruh Media Sosial terhadap Politisasi Opini Publik di Era Digital." *Jurnal Komunikasi Politik*. Vol. 11, No. 1.
- Rismayana, D. (2019). "Komunikasi Politik dalam Konteks Polarisasi Sosial." *Jurnal Komunikasi dan Politik*. Vol. 12, No. 2.
- Santoso, B. (2022). "Peran Media Sosial dalam Menangkal Hoaks di Era Konflik Politik." *Jurnal Media dan Budaya*. Vol. 9, No. 2.
- Suryanto, S. (2017). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sumarni, S. (2016). *Komunikasi Massa dan Konflik Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Siagian, S. (2018). *Teori Komunikasi: Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Gunung Agung.
- Wijaya, H. (2022). "Strategi Komunikasi Politik dalam Menghadapi Konflik Sosial." *Jurnal Komunikasi Indonesia*. Vol. 14, No. 4.
- Wulandari. (2021). "Ruang Gema dan Polarisasi dalam Konflik Politik di Media Sosial." *Jurnal Komunikasi Politik*. Vol. 13, No. 2.